

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 **Simpulan**

Pertama, latar belakang kehidupan Wilopo dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu latar belakang pendidikan dan latar belakang politik. Dari kedua latar belakang tersebut, penulis dapat menafsirkan bahwa dalam menempuh pendidikan, Wilopo selalu berusaha untuk mendapatkan beasiswa sehingga bisa mengurangi beban keluarganya. Pribadi Wilopo juga memiliki etos kerja yang tinggi, karena meskipun ia telah mendapatkan beasiswa, ia tetap bekerja di paruh waktu untuk menutupi kekurangan biaya hidupnya. Sikap dewasa Wilopo sudah terlihat ketika Wilopo masih remaja tepatnya ketika ia baru menyelesaikan pendidikannya di AMS, ia menerima kenyataan dengan lapang dada bahwa ayah yang sebenarnya adalah seseorang yang dikenal sebagai pamannya yaitu Soedjono Soeradirdjo. Selain itu, pengalaman Wilopo di bidang politik yaitu selalu mengemban amanat di bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut banyak mempengaruhi sikap dan kebijakan Wilopo ketika menjadi perdana menteri pada tahun 1952-1953.

Kedua, mengingat pentingnya peran perdana menteri dalam sistem demokrasi parlementer yang digunakan Indonesia saat itu, maka ketika terjadi kekosongan akibat jatuhnya Kabinet Sukiman, kepala negara kemudian menunjuk formatur untuk segera menyusun kabinet, dan Wilopo dipercaya untuk mengemban tugas tersebut. Penting untuk mempertimbangkan kekuatan politik di dalam parlemen dalam menyusun kabinet, seperti yang dilakukan Kabinet Wilopo dengan didukung oleh dua partai besar yaitu PNI dan Masyumi dan beberapa partai kecil lainnya.

Ketiga, rancangan program kerja yang disusun Kabinet Wilopo tidak lepas dari persoalan yang sedang dihadapi Indonesia waktu itu, program kerja merupakan rancangan yang belum dilaksanakan dan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan. Latar belakang politik Wilopo yang seringkali mengisi jabatan di bidang sosial atau perburuhan serta di bidang ekonomi mempengaruhi pola kebijakan yang tertuang dalam program kerja Kabinet Wilopo yaitu dengan melengkapi aturan-aturan untuk memperbaiki kehidupan kaum buruh, serta penguatan produksi nasional dengan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan negara kemudian ditambah dengan berusaha memperbaiki citra politik luar negeri yang bebas aktif.

Keempat, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan RUU Pemilu yang menjadi persoalan selama bertahun-tahun. Maka dengan demikian, pemerintah dapat meyakinkan beberapa lapisan masyarakat, salah satunya pihak militer yang terlibat dalam peristiwa 17 Oktober 1952 yang menuntut untuk segera menyelenggarakan pemilu. Kondisi politik dalam negeri sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan di bidang kehidupan yang lainnya seperti bidang ekonomi, karena carut marut perekonomian banyak disebabkan belum stabilnya politik dalam negeri, terlebih masyarakat masih belum mampu mengembangkan sektor ekonomi secara baik, maka dari itu program ekonomi benteng mampu menghasilkan pengusaha baru pribumi, meskipun masih banyak yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dalam politik luar negeri, Kabinet Wilopo berhasil memulihkan citra Indonesia di mata dunia dengan tidak melakukan kerjasama yang mengikat secara politik atau militer dengan menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Namun berbeda dengan hubungan Indonesia-Belanda yang semakin memburuk. Hal tersebut disebabkan oleh tersendatnya penyelesaian masalah Irian Barat yang menimbulkan adanya keinginan dari pihak Indonesia untuk membatalkan beberapa keputusan KMB, salah satunya menyangkut hubungan Uni Indonesia-Belanda.

Kelima, keberlangsungan Kabinet Wilopo sangat dipengaruhi oleh komposisi partai politik koalisi dalam kabinet. Keberlangsungan koalisi tersebut terkadang tidak selamanya berjalan bersama, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bila kebijakan yang dikeluarkan dirasa sudah tidak sejalan dengan salah satu partai pendukung, maka tidak mengherankan apabila partai politik tersebut menarik dukungan dari kabinet. Begitu pun yang terjadi pada Kabinet Wilopo, peristiwa Tanjung Morawa yang memakan korban jiwa dan terkesan tidak memihak kaum petani atas penyelesaian sengketa lahan, membuat PNI sebagai partai pendukung menarik dukungan dari Kabinet Wilopo. Sehingga Kabinet Wilopo tidak mampu lagi mempertahankan posisinya di parlemen. Kemudian pada tanggal 2 Juni 1953, sebelum parlemen memutuskan melalui sidangnya, Kabinet Wilopo telah memutuskan untuk mengundurkan diri.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian skripsi dengan judul “Kebijakan-kebijakan pada Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo di Indonesia Tahun 1952-1953” maka penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi **Aldi Maulana, 2018**

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dari beberapa pihak, antara lain:

a. Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan SMA atau sederajat, penelitian ini dapat dijadikan referensi sumber maupun bacaan terkait tokoh nasional Wilopo juga materi Sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal yang sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) Kelas XII semester 1 Sejarah Indonesia. Adapun Kompetensi Dasarnya sebagai berikut:

- 3.2. Mengevaluasi peran tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948-1965.
- 3.3. Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.

b. Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam meneliti perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan pada masa Demokrasi Liberal, juga termasuk kajian lebih lanjut mengenai tokoh Wilopo. Penulis menyadari bahwa penelitian tentang Wilopo belum terlalu banyak, maka dari itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam membahas:

1. Peranan politik Wilopo di Indonesia periode 1953 (setelah berhenti menjadi perdana menteri) sampai Wilopo tidak terlibat lagi dalam dunia politik praktis.
2. Dampak kebijakan program ekonomi benteng di berbagai daerah di Indonesia.
3. Hubungan sipil dan militer pada masa kabinet setelah Wilopo

c. Departemen Pendidikan Sejarah

Bagi Departemen Pendidikan Sejarah penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi maupun menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa Pendidikan Sejarah terutama dalam mata kuliah

Aldi Maulana, 2018

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Sejarah Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin, khususnya pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo tahun 1952-1953.

Aldi Maulana, 2018

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu